

**PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETERNAKAN SAPI POTONG  
DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BANTUL  
PROVINSI D. I. YOGYAKARTA**

***DEVELOPMENT OF BEEF CATTLE FARMING INSTITUTIONAL IN THE  
COASTAL AREA OF BANTUL REGENCY PROVINCE D. I. YOGYAKARTA***

**Wijarwati, Muhamad Fatah Wiyatna dan Mumun Munandar Sulaeman**

Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Jatinangor Sumedang Jawa Barat  
email: wijarwati@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir kabupaten Bantul Provinsi D. I. Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasi potensi kelembagaan peternakan sapi potong di wilayah pesisir. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan oktober 2018, dengan metode analisis deskriptif kualitatif berdasarkan fenomena di lapangan. Penelitian dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap satu adalah mengidentifikasi potensi peternakan di wilayah pesisir, baik teknis maupun kelembagaan. Tahap dua adalah menganalisa bagaimana karakteristik masyarakat pesisir dan peran kelompok ternak dalam mendukung perkembangan peternakan sapi potong di wilayah pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak sudah mempunyai pengetahuan yang memadai dalam budidaya sapi potong. Kelompok ternak yang terbentuk di wilayah penelitian mempunyai sejarah dan latar belakang yang dinamis sampingan sebagai bentuk adaptasi masyarakat pesisir terhadap sumberdaya yang ada. Peternakan sapi potong di wilayah penelitian sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sentra peternakan sapi potong, hal ini didukung oleh tersedianya hijauan pakan ternak yang cukup banyak karena ditopang oleh daerah aliran sungai yang subur yaitu sungai Opak dan sungai Progo. Kelembagaan merupakan sarana penguat baik dari peternak maupun pemerintah. Pemerintah seharusnya bertindak sebagai regulator dalam mendukung perkembangan peternakan di wilayah pesisir dalam upaya meningkatkan populasi sapi dan kesejahteraan peternak kecil.

***Kata kunci:*** kelembagaan peternakan sapi potong, wilayah pesisir, kelompok ternak, populasi, peternak kecil

**ABSTRACT**

*This research was conducted in the coastal area of Bantul district, Province, Yogyakarta. This study aims to analyze and identify the institutional potential of beef cattle breeding in coastal areas. This research was conducted from August to October 2018, with a qualitative descriptive analysis method based on phenomena in the field. Research is divided into several stages. The first stage is identifying potential livestock in coastal areas, both technical and institutional. The second stage is analyzing how the characteristics of coastal communities and the role of livestock groups in supporting the development of beef cattle farms in coastal areas. The results of the study show that farmers already have sufficient knowledge in beef cattle cultivation. Livestock groups formed in the study area have a history and background. dynamic side as a form of adaptation of coastal communities to existing resources. Beef cattle in the research area is very potential to be developed as a center for beef cattle farms, this is supported by the availability of sufficient fodder because it is supported by fertile watersheds namely the Opak river and the Progo river. Institution is a means of reinforcement both from farmers and the government. The government should act as a regulator in supporting the development of livestock in coastal areas in an effort to increase cattle population and the welfare of small farmers.*

***Keywords:*** Institution of beef cattle farms, coastal areas, livestock groups, population, small farmers

## PENDAHULUAN

Kebutuhan daging sapi nasional yang semakin meningkat membutuhkan terobosan baru dalam bidang peternakan, terutama dengan meningkatkan peranan peternak rakyat di pedesaan, termasuk desa – desa di wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan kawasan pembangunan yang penting karena 60% masyarakat bermukim di kawasan ini (Dahuri, 2002).

Menurut UU no. 27 tahun 2007 yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara laut dan darat dan wilayah ini mendapat pengaruh dari laut dan darat. Batas ke arah laut mencakup 12 mil diukur dari garis pantai dan ke arah darat sampai batas wilayah administrasi kecamatan. Kondisi sumberdaya wilayah pesisir yang bervariasi menuntut masyarakat yang tinggal di wilayah ini beradaptasi sesuai dengan kondisi sumberdaya alam yang ada. Hal inilah yang menyebabkan beragamnya mata pencaharian masyarakat pesisir. Bertani dan beternak merupakan alternative pekerjaan lain selain sebagai nelayan. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Satria (2015), yang menyatakan bahwa masyarakat pesisir mulai beradaptasi dengan kondisi alam dan sumberdaya yang terbatas guna melangsungkan kehidupannya.

Dalam konteks pembangunan wilayah pesisir, keterlibatan masyarakat termasuk kelembagaan yang ada sangat penting. Kebijakan pembangunan di wilayah pesisir termasuk sektor peternakan harus memperhitungkan peranan dan pentingnya kelembagaan peternakan dalam upaya

mewujudkan pembangunan peternakan yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan peternak. Kebijakan pembangunan kelembagaan akan meningkatkan mekanisme pengaturan alokasi sumberdaya, mengorganisasikan kepentingan, dan memberikan kepastian hukum serta ketegasan dalam pelaksanaannya. Pembangunan lembaga akan meningkatkan aktifitas perekonomian seperti kemitraan dan investasi serta kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Hal ini akan menciptakan keadaan yang kondusif bagi kehidupan peternak pesisir dalam menjalankan usaha peternakan sapi potongnya.

Pengembangan kelembagaan di wilayah pesisir akan selalu mengalami perubahan yang dinamis seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat pesisir. Awal pembentukan kelompok ternak di wilayah pesisir dimulai pada awal tahun 90-an yang merupakan titik tolak perubahan kelembagaan peternak di kawasan ini. Kelompok ternak sapi potong di wilayah pesisir merupakan salah satu bentuk kelembagaan lokal yang dibentuk oleh masyarakat pesisir. Jika pengelolaan kelompok ternak ini dapat dilakukan secara optimal maka akan sangat mendukung perkembangan peternakan sapi potong di wilayah pesisir.

Permasalahan yang banyak muncul dilapangan adalah sistem budidaya sapi potong di wilayah pesisir masih bersifat subsisten dan tidak dikelola secara professional. Hal ini terjadi karena masyarakat pesisir tidak menjadikan peternakan sebagai pekerjaan utama, karena dipandang tidak menguntungkan.

Kultur masyarakat pesisir sebagai nelayan dan adanya pekerjaan dari sector pariwisata yang lebih cepat menghasilkan uang membuat banyak generasi muda meninggalkan usaha peternakannya. Dengan mengoptimalkan peran kelembagaan yang ada diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peternak dalam mengelola ternak, serta jaminan pasar dan keuntungan dari usaha peternakan yang dikelola. Sehingga sector peternakan akan diminati oleh generasi muda dan keberlanjutannya dapat dipertahankan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi kelembagaan dan potensi daya dukung peternakan di wilayah pesisir yang mendukung perkembangan peternakan sapi potong dan menganalisa bagaimana peranan serta karakteristik masyarakat pesisir dalam memaknai ternaknya sebagai upaya untuk mengembangkan peternakan sapi potongnya. Diharapkan penelitian ini akan mampu memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah kabupaten Bantul dalam upaya pemanfaatan potensi wilayah pesisir dalam bidang peternakan, khususnya sapi potong, sehingga akan mendukung program Kementerian Pertanian dalam upaya percepatan populasi sapi potong untuk mencapai swasembada daging sapi di tahun 2026.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2018. Tempat penelitian adalah wilayah pesisir kabupaten Bantul yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu

kecamatan Kretek, kecamatan Sanden dan Kecamatan Srandakan. Pemilihan lokasi ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain: 1). Menurut UU no. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir, yang termasuk wilayah pesisir di kabupaten Bantul adalah tiga kecamatan yaitu Kretek, Sanden dan Srandakan; 2). Perda no. 04 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul periode 2010-2030; 3) Sesuai dengan kerangka pikir penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai pengembangan kelembagaan peternakan sapi potong di wilayah pesisir; 4). Kelompok ternak yang dipilih sebagai informan adalah kelompok ternak yang dibentuk oleh masyarakat asli pesisir, bukan pendatang.

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Observasi dilakukan dengan meninjau dan mengumpulkan informasi tentang potensi peternakan sapi potong di lokasi penelitian, yang mencakup sumberdaya peternak, sumberdaya ternak dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh langsung dari informan yang mempunyai kapabilitas dalam menjelaskan dan menggambarkan mengenai kelompok ternak di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari catatan-catatan, buku literature, regulasi peraturan dan data pendukung lain seperti data BPS, catatan Desa dan Kecamatan, Programa penyuluhan kecamatan, profil dan monografi.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan. Adapun metode pengumpulan data adalah 1). Wawancara langsung kepada peternak, penyuluh, petugas; 2). Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi factor-faktor unggulan dalam pembangunan peternakan sapi potong; 3). Observasi atau pengamatan langsung di lapangan; 4). Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada. Sampel penelitian dibedakan menjadi dua yaitu informan dari pihak stakeholder dan informan peternak. Informan terdiri dari Dinas Pertanian kabupaten Bantul, Pejabat kecamatan, Petugas Puskesmas, Penyuluh dan peternak sapi potong.

Teknis analisis data terdiri dari tiga tahapan yaitu 1). Reduksi data; 2). Penyajian data dan; 3). Penarikan kesimpulan. Data juga akan dilakukan uji validitas melalui triangulasi data. Tujuan triangulasi data adalah untuk memperoleh gambaran yang tepat dan tidak bertentangan dengan data-data yang lain sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara empiris (Moleong, 2011).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran umum wilayah**

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah 506,85 km<sup>2</sup> (15,90% dari luas wilayah Provinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan. Bagian Barat adalah daerah landai

serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km<sup>2</sup> (17,73%). Bagian Tengah adalah daerah datar dan landai yang merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 km<sup>2</sup> (41,62%). Bagian Timur adalah daerah yang landai, miring dan terjal seluas 206,05 km<sup>2</sup> (40,65%). Sedangkan di bagian Selatan merupakan bagian dari bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek. Wilayah pesisir di kabupaten Bantul berbatasan langsung dengan samudera Hindia, yaitu kecamatan Kretek, Sanden dan Srandakan dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl.

### **Potensi peternakan di wilayah pesisir**

Seiring dengan berkembangnya sarana infrastruktur menyebabkan kemajuan yang luar biasa di bidang pariwisata. Hal ini merupakan tantangan tersendiri di sektor pertanian dan peternakan, karena adanya persaingan penggunaan lahan pesisir.

Peternakan sapi potong di wilayah pesisir masih bersifat subsisten dan bukan merupakan mata pencaharian pokok masyarakat. Sistem pemeliharaan intensif di dalam kandang, yang otomatis pakan 100% disediakan oleh peternak. Hal ini dikarenakan tidak adanya lahan penggembalaan. Pada umumnya peternak sudah memiliki kebun HMT sendiri, sehingga ketersediaan pakan hijauan tidak mengalami banyak kendala, baik pada musim hujan maupun kemarau. Pola pemeliharaan dengan kandang akan memudahkan di dalam pengawasan ternak. Pakan diberikan dua kali sehari, pagi hari diberikan pakan tambahan

buatan sendiri yang sering disebut komboran, kemudian diberikan pakan hijauan pagi dan sore. Pada malam hari air minum dan jerami padi diberikan secara *ad-libitum*. Sapi potong yang banyak dipelihara oleh peternak di wilayah pesisir adalah jenis simmental, limousin dan peranakan ongol. Kebanyakan sapi- sapi ini dipelihara untuk tujuan memproduksi pedet. Peternak menjual pedet setelah berumur 6 sampai 8 bulan. Dengan cara ini ternyata peternak merasa diuntungkan dari usaha sambilan yang mereka lakukan.

Menurut data dari BPS kabupaten Bantul populasi sapi potong di ketiga lokasi penelitian cukup tinggi. Hal ini karena didukung oleh potensi pemanfaatan daerah aliran sungai Opak dan Progo sebagai tempat budidaya HMT. Data dari kecamatan Kretek menunjukkan luas DAS Opak mencapai 20 ha dan DAS sungai Progo seluas 30 ha. Pada musim kemarau lahan yang bias dimanfaatkan akan semakin luas karena menurunnya debit air sungai.

Tabel 1. Populasi sapi potong di wilayah pesisir di kabupaten Bantul

Jumlah populasi sapi (ekor)/ tahun	Kecamatan		
	Kretek	Sanden	Srandakan
2011	3.939	3.612	4.017
2012	4.177	3.830	4.260
2013	2.530	2.320	2.580
2014	2.598	2.382	2.648
2015	2.699	2.475	2.750
2016	2.804	2.570	2.856

Data populasi pada Tabel 1 dapat diperoleh gambaran bahwa populasi sapi di wilayah pesisir cukup tinggi, lebih dari 7.000 ekor. Hal ini karena didukung oleh potensi pakan dan hijauan yang memadai. Sebagian besar wilayah pesisir merupakan lahan pertanian yang subur, sehingga limbah hasil pertanian cukup berlimpah terutama pada saat musim panen. Sumber pakan yang berasal dari limbah antara lain jerami padi, jerami jagung, jerami kacang tanah, dan sisa limbah palawija lainnya seperti kulit kedelai dan daun singkong. Pengetahuan peternak mengenai tatacara budidaya dan pengelolaan sapi potong juga cukup tinggi. Data dari BP3K kecamatan

menunjukkan bahwa kemampuan peternak dalam menerapkan teknologi dan pengelolaan sapi potong mencapai skor 80. Hal ini berarti peternak sudah mengetahui bagaimana cara pemberian pakan, pembuatan kandang, dan pemeliharaan kesehatan ternaknya. Di beberapa kelompok ternak sudah terdapat unit pengolahan limbah menjadi biogas dan pupuk kompos komersial. Pengolahan pakan juga sudah dilaksanakan antara lain jerami padi amoniasi, fermentasi jerami dan hijauan, pembuatan komboran atau pakan tambahan dan cara penyimpanan bahan pakan kering sebagai persediaan pakan di kandang.

Tingkat pendidikan peternak juga sudah cukup baik, rata-rata tamatan SMP atau sederajat. Tidak dijumpai yang buta huruf. Mobilitas peternak juga cukup tinggi, karena rata-rata sudah memiliki kendaraan bermotor. Pengalaman beternak jika dilihat dari sejarah terbentuknya kelompok ternak, menunjukkan bahwa beternak sapi potong merupakan pekerjaan turun temurun yang sudah ada sejak lama. Bagi masyarakat pesisir ternak merupakan cadangan kekayaan atau tabungan

yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Ternak akan lebih mudah dijual kapan saja, tanpa harus mengeluarkan biaya transport, karena biasanya blantik atau pembeli akan datang langsung ke kandang.

### Potensi Kelembagaan di wilayah pesisir

Kelembagaan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah kelembagaan yang dibentuk oleh peternak sapi potong di wilayah penelitian. Salah satunya adalah kelompok ternak.

Tabel 2. Data kelompok ternak sapi potong di wilayah pesisir kabupaten Bantul

Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Alamat	Jumlah anggota	Tahun berdiri
Kretek	Parangtritis	Empat Lima	Bungkus	70	1989
		Andhini Lestari	Grogol VIII	56	2000
		Makmur	Depok	45	2000
		Ngudi Karyo	Mancingan XI	70	2002
		Makaryo	Grogol IX	85	1989
	Tirtohargo	Andhini Mulyo	Karang	75	1989
		Jurang Asih	Gegunung	65	2000
		Andhini Lestari	Baros	75	2002
		Muneng Gumregut	Muneng	60	1989
		Sanden	Srigading	Karya Manunggal	Tegalrejo
Bareng Mukti	Malangan			15	2009
Ngudi Rejeki	Kalijurang			15	2005
Gadingsari	Gemah Ripah		Nampan	40	2005
	Andini Raharjo		Ndayu	40	1999
Srandakan	Poncosari	Pandan Mulyo	Ngentak	100	1994
		Manunggal	Bibis	40	2010
		Bismo	Talkondo	30	1998
		Sido dadi II	Gunturgeni	20	2007
		Andini Mukti	Jopaten	20	2002
		Ngudi Waras	Kuwaru	20	1994
		Nandi amartani	Sambeng	20	2003
		Ngudi Rahayu	Wonotingal	20	1996
		Ngudi Hasil	Cangkring	20	1994

Data di atas bersumber dari Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bantul.

Data pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah kelompok ternak sapi cukup banyak yaitu 23 kelompok dengan jumlah anggota bervariasi di masing-masing kelompok.

Kelompok ternak ini mulai terbentuk sejak awal tahun 90-an, dimana waktu itu ada kebijakan top down dari kecamatan agar dibentuk kandang kelompok yang terpusat dan terpisah

dari pemukiman penduduk. Hal ini terjadi karena keprihatinan kondisi lingkungan yang tidak sehat pada waktu itu. Rumah bercampur dengan kandang sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan, yang imbasnya akan menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu muncul gagasan untuk membangun kandang secara berkelompok dan terpusat yang jauh dari pemukiman. Karena seringnya aktifitas bersama maka terbentuklah kelompok ternak di masing-masing wilayah kandang kelompok

Peternak merasa mendapat keuntungan setelah bergabung dengan kelompok. Dengan kelompok maka terjadi difusi pengetahuan antar anggota maupun antar kelompok. Kelompok juga merupakan wadah atau organisasi resmi bagi peternak untuk dapat menyampaikan aspirasi dan pelayanan yang lebih baik. Semua kelompok di wilayah pesisir sudah terdaftar resmi dan mempunyai no register di Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bantul. Dengan adanya register ini maka kelompok dapat memperoleh pembinaan dan program-program dari pemerintah maupun swasta. Beberapa program bantuan yang sudah diperoleh antara lain Proyek Peternakan Pedesaan (PPAP) dari Bogasari, Proyek Kawasan Sentra Produksi (PKSP), Program Upsus Siwab, dll.

Banyaknya jumlah kelompok ternak menunjukkan bahwa peternak sadar akan pentingnya kelompok. Partisipasi anggota kelompok dalam kegiatan program cukup tinggi, karena peternak merasa memiliki kepentingan yang sama dalam kelompok.

Struktur kepengurusan kelompok sudah lengkap dengan adanya ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris dan seksi humas. Pertemuan kelompok biasanya dilakukan setiap bulan. Tingkat kehadiran anggota dalam rapat lebih dari 70%. Hal ini menunjukkan bahwa anggota terlibat di dalam semua tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta sharing benefit atau berbagi pengetahuan dan manfaat antar anggota.

Penyuluhan juga dilakukan bersamaan dengan kegiatan pertemuan rutin. Namun karena terbatasnya tenaga penyuluh peternakan, maka penyuluhan banyak membahas bidang pertanian. Ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi peternak. Jika ternaknya mengalami masalah kesehatan, biasanya peternak akan langsung menghubungi puskesmas terdekat. Untuk kecamatan Kretek maka masuk ke wilayah kerja puskesmas Pundong. Kecamatan Srandakan dan sanden masuk ke dalam wilayah kerja puskesmas Sanden. Masing-masing desa sudah mempunyai satu orang inseminator. Petugas kesehatan hewan dari puskesmas tidak bertanggungjawab secara langsung terhadap kelompok ternak, tetapi hanya menangani masalah teknis pemeliharaan dan kesehatan hewan. Secara penuh tanggungjawab pembinaan kelompok berada pada Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) masing-masing kecamatan. Namun karena terbatasnya penyuluh yang mempunyai background pendidikan peternakan, hal ini menjadi kendala di lapangan. Yang ada hanya mantri tani bukan

mantri ternak, sementara tupoksi yang dibebankan kepada penyuluh juga berat, sehingga seolah-olah sektor peternakan kurang mendapatkan pembinaan. Faktor inilah yang sering dikeluhkan oleh peternak. Beberapa kelompok ternak juga mengalami vakum dan tidak berkembang.

### **Strategi pengembangan kelompok ternak**

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya kesadaran peternak untuk membentuk kelompok tinggi, namun karena terkendala berbagai masalah teknis maka peternak mencari alternatif pekerjaan lain yang lebih cepat menghasilkan uang. Pesatnya perkembangan sektor pariwisata di wilayah pesisir menyebabkan banyak peternak yang beralih profesi bekerja di sektor pariwisata. Hibah ternak bergulir yang macet serta tingkat kepercayaan anggota kelompok terhadap kepengurusan kelompok juga menjadi faktor penghambat kemajuan kelompok. Kesibukan masing-masing anggota menyebabkan tingkat kehadiran rapat rutin bulanan menjadi rendah. Banyak dari anggota kelompok yang mengambil lagi ternaknya dan dipelihara di depan rumah. Ini banyak terjadi di kecamatan Sanden. Anggota merasa kurang aman jika ternaknya ditinggalkan di kandang kelompok.

Berbagai permasalahan di atas tentu membutuhkan strategi dengan memanfaatkan sumberdaya kelembagaan dan peluang yang ada di wilayah pesisir. Keberadaan penyuluh, tenaga medis, paramedik, pemerintah desa, perbankan dan dinas terkait harus bersinergi dalam pemanfaatan tataruang wilayah pesisir, agar tidak terjadi konflik kepentingan dan

tataguna lahan. Kemajuan sektor pariwisata seharusnya tidak meminggirkan sektor peternakan maupun pertanian.

Peran penyuluh perlu ditingkatkan dengan program kegiatan yang lebih intensif. Hal ini penting untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan peternak. Pihak desa harus membuat skala prioritas program-program yang akan dilaksanakan. Tersedianya lembaga keuangan dan pasar hewan harus mampu mendorong kemajuan dan menginspirasi peternak untuk memajukan usahanya. Peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi dalam mengelola usaha peternakan perlu di dorong oleh peningkatan modal dengan mengoptimalkan LKM Gapoktan PUAP di masing-masing desa.

Jika komponen kelembagaan terkait sudah bekerja dengan baik, maka akan terjadi peningkatan kemitraan usaha dari pihak pemodal, sehingga peternak termotivasi untuk serius mengelola usaha peternakannya. Konsep *agrotourism* juga dapat dijadikan alternatif yang menjanjikan tanpa harus memarginalkan kegiatan pertanian dan peternakan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kelembagaan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan termasuk di wilayah pesisir. Wilayah pesisir termasuk dalam kawasan strategis yang akan mempunyai *multiplier effect* dalam berbagai bidang, tidak saja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tapi juga berbagai sektor turunan lainnya secara berkelanjutan. Kelompok ternak yang sudah terbentuk di wilayah ini perlu untuk

ditingkatkan fungsi dan peranannya sehingga akan mendorong situasi yang kondusif terhadap peningkatan investasi dan kepercayaan publik kepada birokrasi dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Bantul.

Salah satu strategi yang dapat dilaksanakan adalah dengan sistem agrowisata yang menggabungkan berbagai potensi wilayah pesisir. Pemerintah sebagai regulator seharusnya memberikan jaminan pengaturan dan regulasi yang berpihak kepada kepentingan peternak rakyat, sehingga peternak merasa tenang dan termotivasi untuk mengembangkan usahanya. Salah satu indikatornya adalah dengan meningkatnya jumlah kepemilikan sapi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 04 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030.
- Anonimous. 2016. Buku Pintar Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2016, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
- Anonimous. 2016. Kabupaten Bantul Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul.
- Anonimous. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Dahuri, *et al.* 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, cetakan ke dua, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fatah, Wiyatna, *et al.*, 2012. Potensi Pengembangan Usaha Sapi Potong Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Jurnal Ilmu Ternak. 12(2): 16 – 21.
- Munandar, M. 2016. Peternakan dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGS) Perspektif Sosiologia, Prosiding Semnas Peternakan Berkelanjutan ke 8, Unpad, Sumedang.
- Moleong, J. Lexi. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Satria, Arif. 2015. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Suresti, A; Wati, R. 2012. Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Potong di Kabupaten Pesisir Selatan, Jurnal Peternakan Indonesia. 14(1): 249-262.